

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemerintah daerah merupakan salah satu unit penyelenggaraan pemerintahan atas dasar pelimpahan tugas dari pemerintah pusat yang berfokus pada otoritas administratif suatu daerah. Dengan memegang asas otonom dan tugas pembantuan, suatu pemerintahan daerah memenuhi tujuannya yaitu menyejahterakan masyarakat serta melaksanakan tugas pemerintahan sebagaimana semestinya. Setiap pemerintah daerah menjalankan tugas dan fungsi didasari oleh anggaran yang diberikan, disebut dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang merupakan turunan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). APBD merupakan rencana keuangan tahunan yang terdiri dari pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan.

Selain pengalokasian yang harus benar, anggaran tersebut wajib dilakukan pencatatan yang baik pula, guna untuk menghindari dari kesalahan. Pencatatan di pemerintah daerah memiliki pedoman berupa Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). yang telah mengalami perubahan dari masa ke masa. Menurut PP No.24 tahun 2005, awalnya Standar akuntansi pemerintahan menggunakan basis kas untuk mengakui pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta basis akrual untuk pengakuan

aset, kewajiban, dan ekuitas dalam Neraca. Lalu, pada PP No. 71 tahun 2010 dijelaskan bahwa standar akuntansi pemerintah berganti basis yang awalnya basis *Cash To Accrual* menjadi basis Akruwal.

Pada proses akuntansi di pemerintah daerah, akan menghasilkan laporan berupa Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan Laporan Operasional (LO). Laporan Realisasi anggaran menyajikan informasi pendapatan dan belanja yang terjadi dibanding dengan anggarannya, sedangkan Laporan Operasional memberikan informasi mengenai naik-turunnya Saldo Anggaran Lebih (SAL) tahun pelaporang dengan tahun sebelumnya yang bersifat akruwal. Dalam LRA terdapat pos-pos akun yang dibahas, salah satunya pos akun belanja. Belanja menjadi salah satu hal yang kompleks perlakuannya dalam Laporan Realisasi Belanja dikarenakan pada laporan menggunakan basis kas yang menuntut setiap pos-pos memberikan informasi yang benar terkait realisasi yang terjadi. Di penerapan akuntansi pemerintah, akun belanja diatur lebih lanjut pada Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 02 (PSAP 02) tentang Laporan Realisasi Anggaran serta Buletin Teknis Nomor 04 mengenai Penyajian Dan Pengungkapan Belanja Pemerintah. Dalam PSAP 02, belanja diklasifikasikan menjadi belanja tidak langsung dan belanja langsung. Belanja langsung diuraikan menjadi beberapa poin salah satunya belanja barang.

Tahun 2020 merupakan awal peristiwa pandemi Covid-19 yang menghambat kegiatan di seluruh sektor pemerintahan salah satunya pada sektor belanja barang pemerintah. Dari sisi pemerintah daerah, pandemi ini berdampak ke perubahan anggaran APBD yang lebih dikonsentrasikan ke belanja terkait bidang kesehatan. Perubahan tersebut juga dilandasi dengan terbitnya perda-perda dan regulasi terkait

akuntansi di masa pandemi. Pada Pemerintah Kota Binjai, terjadi perubahan anggaran belanja yang sebelumnya telah tertera pada APBD menjadi sebesar Rp983.030.628.519.60. Adapun Peraturan Walikota No. 09 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Binjai No. 02 Tahun 2020 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun 2020 bahwa terjadi pengurangan belanja barang dan jasa sebesar Rp26.226.828.842,00. Kemudian dilengkapi dengan terbitnya Perda No. 01 tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2020 membuat realisasi belanja barang semakin terfokus.

Pemerintah Kota Binjai merupakan salah satu Pemerintah daerah yang terdampak akan pandemi. Tercatat di tahun 2020 Pemerintah Kota Binjai mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang disusun. Tercatat sejak 2016, Pemkot Binjai meraih WTP 6 kali berturut-turut. Ini merupakan hal yang menarik untuk ditinjau, mengingat beberapa daerah di Sumatera Utara sukar mendapatkan opini WTP di tahun 2020 karena penerapan, kebijakan serta anggaran yang berubah-ubah. Sebagai contoh, Pemerintah kota Tanjung balai mendapatkan opini WDP dari BPK-RI di tahun 2020, padahal dari segi luas cakupan daerah, Tanjung balai lebih kecil dari Pemerintah kota Binjai yang seharusnya mampu lebih baik di segi akuntansi. Belanja barang merupakan salah satu akun yang rawan akan kesalahan dalam pencatatan serta penerapan akuntansi, semakin besar daerahnya maka banyak fasilitas atau barang yang harus direalisasikan. Atas pertimbangan dan ketertarikan tersebut, Penulis menjadikan Pemerintah Kota Binjai sebagai objek penulis, meninjau bagaimana pemerintah

kota binjai mengelola belanja barang serta penerapan akuntansi belanja barang dimasa pandemi Covid-19. Kemudian penulis akan menjelaskannya pada Karya Tulis Tugas Akhir yang berjudul “Tinjauan Atas Penerapan Akuntansi Belanja Barang Selama Pandemi Covid-19 Pada Pemerintah Kota Binjai Tahun 2020”.

1.2 Rumusan Masalah

Terkait dengan latar belakang tersebut, terdapat beberapa rumusan masalah berikut:

- 1) Bagaimana pengklasifikasian akun belanja pada Pemerintah Kota Binjai?
- 2) Bagaimana penerapan akuntansi belanja barang di Pemerintah Kota Binjai?
Apakah sudah sesuai?
- 3) Apa kebijakan yang dilakukan Pemerintah Kota Binjai dalam menangani anggaran belanja barang di tengah pandemi?
- 4) Apakah perubahan tersebut berdampak pada akuntansi belanja barang?

1.3 Tujuan Penelitian

Berikut tujuan yang ingin dicapai dari penulisan Karya Tulis Tugas Akhir ini, yaitu:

- 1) Untuk melihat pengklasifikasian akun belanja pada Pemerintah Kota Binjai
- 2) Untuk meninjau penerapan akuntansi belanja barang di Pemerintah Kota Binjai apakah sudah sesuai atau belum
- 3) Untuk mengetahui kebijakan yang dilakukan Pemerintah Kota Binjai dalam menangani anggaran belanja barang di tengah pandemi
- 4) Untuk mengetahui perubahan yang berdampak pada akuntansi belanja barang.

1.4 Ruang Lingkup Penulisan

Dalam penulisan KTTA ini, penulis membatasi ruang lingkup tulisan hanya pada penerapan dan peraturan akuntansi belanja barang Pemerintahan Kota Binjai pada tahun anggaran 2019-2020.

1.5 Manfaat Penulisan

Dengan adanya penulisan ini, diharapkan dapat memberikan manfaat secara akademis maupun praktis, diantaranya:

1) Manfaat Akademis

Diharapkan dengan penulisan ini dapat mengembangkan dan memberi wawasan terkait penerapan akuntansi belanja dimasa pandemi Covid-19 serta mampu menjadi acuan bagi penulis selanjutnya untuk membandingkan data pada penulisan ini dengan data dimasa mendatang.

2) Manfaat Praktis

Bagi objek terkait, dapat menjadi bahan evaluasi untuk kedepannya mengenai ketepatan penerapan akuntansi barang di pemerintah kota binjai serta menjadi sebuah informasi yang dapat digunakan untuk kedepannya.

1.6 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan tentang latar belakang pengambilan topik, rumusan masalah yang ingin diteliti, tujuan melakukan penulisan, batasan ruang lingkup penulisan, serta metode-metode pengumpulan dari data yang sesuai dengan sistematika penulisan yang disajikan pada sub bab tersendiri didalam pedoman penulisan karya ilmiah.

BAB II LANDASAN TEORI

Pada bab berikut membahas teori-teori yang menjadi dasar dalam pengembangan topik tentang penerapan akuntansi belanja pemerintah. Adapun teori atau landasan ini berasal dari penelitian sebelum-sebelumnya yang pernah dilakukan ataupun berasal dari analisis topik yang sama namun objek yang berbeda. Bab ini diawali dengan definisi belanja, penjelasan klasifikasi belanja, pengakuan serta pengukuran akuntansi belanja barang, serta aturan-aturan terkait akuntansi belanja barang pemerintah yang didapat dari literatur buku, jurnal, dan aturan-aturan pemerintah.

BAB III METODE DAN PEMBAHASAN

Bab metode dan pembahasan, menjelaskan tentang gambaran umum Pemerintah Kota Binjai yang menjadi objek Karya Tulis Tugas Akhir ini, meliputi profil, visi dan misi, struktur organisasi, peran dan fungsi, kebijakan mengenai akuntansi pemerintah yang diterapkan, serta aturan-aturan yang terbentuk untuk menindaklanjuti akuntansi belanja barang di tengah Pandemi Covid-19. Selain itu, di bab ini membahas tentang tahapan yang dilakukan dalam peninjauan ini, yaitu mengumpulkan data, melakukan analisis, membandingkan data yang telah didapat, dan membuat laporan berupa Karya Tulis Tugas Akhir.

BAB IV SIMPULAN

Pada bahasan ini berisi tentang pernyataan atau ringkasan dari data yang telah dianalisis dan dikumpulkan oleh penulis yang berasal dari objek. Simpulan ini diharapkan mampu menjawab rumusan masalah dan memberikan saran.